

BAB IV

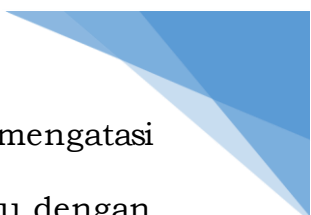
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, laporan kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja kelas telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendorong perkembangan dan kemajuan daerah sebagai daerah otonomi baru.

Sebagai Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, maka sangat diperlukan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pemikiran-pemikiran dan implementasi guna mewujudkan amanah yang telah diemban.

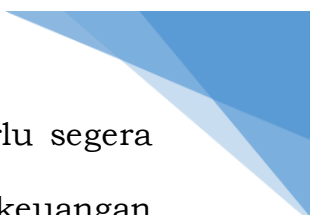


Beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengatasi keterbatasan atau permasalahan yang ada, antara lain : yaitu dengan segera menyelesaikan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah sehingga terpilihnya kepala daerah difinitif, dengan tetap berpegang teguh terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga *good governance* dapat terwujud, lebih mengintensifkan pengelolaan sumber daya keuangan, baik dari segi pendapatan dan belanja secara efisien dan efektif pula, menata dan mengevaluasi kelembagaan dalam hal ini mengkaji kembali struktur organisasi yang masih minimalis yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta melakukan pengisian sumber daya aparatur agar dapat menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak bermakna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini akan menjadikan Laporan benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Saran

1. Dalam rangka lebih meningkatkan peran pemerintah provinsi agar masyarakat dapat terlayani dan terselenggaranya pemerintahan yang baik, maka perlu memperkuat peran dan fungsi dari masing-masing SKPD.
2. Perlu memperkuat koordinasi dibidang perencanaan dan evaluasi sehingga pencapaian target kedepannya dapat lebih meningkat.

- 
3. Agar sistem AKIP dapat diimplementasikan maka perlu segera mensinkronkan antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga good governance dapat terwujud.
 4. Membuat suatu sistem dimana Laporan Kinerja sebagai ukuran keberhasilan atau tidak suatu instansi sehingga dapat diberikan *reward and punishment*.